

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN
BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN
BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

SKRIPSI

**OLEH
LISA AZMI LUBIS
1803100081**

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan Publik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **LISA AZMI LUBIS**
NPM : 1803100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Pada hari,tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.30 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH.,MM**

PENGUJI II : **ANANDA MAHARDIKA, S.Sos.,M.SP**

PENGUJI III : **DR. SITI HAJAR, S.Sos.,M.SP**

(.....)
(.....)
(.....)

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

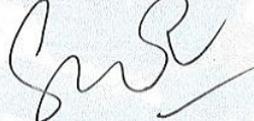
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **LISA AZMI LUBIS**
NPM : 1803100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

Medan, 07 September 2022

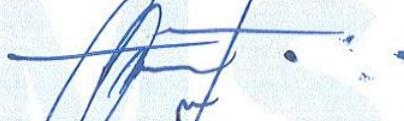
PEMBIMBING



Dr. SITI HAJAR, S.Sos.,M.SP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP



DR. ARIEN SALEH, S.Sos., M.SP

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan ini saya, Lisa Azmi Lubis NPM 1803100081 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah oleh orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi adalah hasil dari tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain atau karya plagiat, atau jiplakan dari karya orang lain.
3. Bahwa didalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah diajukan untuk memperoleh di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila kemudian terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia tenapa mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil dan ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang telah saya terima.

Medan, 15 September 2022

Yang Menyatakan



Lisa Azmi Lubis
Lisa Azmi Lubis

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI
MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA**

**LISA AZMI LUBIS
1803100081**

ABSTRAK

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu kegiatan dalam kebijakan publik proses yang menentukan apakah suatu kebijakan bersentuhan dengan kepentingan publik dan dapat diterima oleh masyarakat. Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016. Program Beasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara sudah ada sejak tahun 2016 dan program ini dilaksanakan oleh Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. Program ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dari Kabupaten Labuhanbatu Utara guna untuk mempercepat proses perkuliahan dan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan menggunakan teknik analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan implementasi kebijakan Geogre C. Edward III model dengan 4 (empat) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, posisi dan struktur birokrasi. Berdasarkan hasil penelitian berdasarkan variabel komunikasi masih belum optimal. Kurangnya sosialisasi dari Kesejahteraan Sosial kepada mahasiswa yang akan menerima bantuan beasiswa. Untuk sumber daya seperti jumlah staf, sarana dan prasarana cukup memadai. Namun, dalam pelaksanaan program beasiswa masih kurang baik. Pelaksanaan disposisi dalam implementasi kebijakan masih kurang efisien. Banyak data-data yang tidak valid dan menyalahgunakan berkas sebagai persyaratan dalam pendaftaran beasiswa. Struktur birokrasi yang ada di Kesejahteraan Sosial sudah berjalan dengan baik. Namun, kendala yang dihadapi yaitu keterbatasan waktu yang diberikan dari pemerintah lokal. Sehingga proses yang dilaksanakan sangat memakan waktu yang singkat.

Kata Kunci : Implementasi, Pemberian, Beasiswa Miskin Berprestasi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillah rabbilalamin Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang terus menerus memberikan Rahmat dan Hidayah-nya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu. Tak lupa pula Shalawat dan beriringkan salam saya ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW yang telah membawa manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Administrasi Publik Konsentrasi Kebijakan Publik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul skripsi ini adalah “Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara”.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari beberapa pihak, baik secara moral maupun material sampai laporan akhir ini selesai. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang teristimewa dan yang utama serta paling tercinta dan tersayang kepada orang tua penulis yaitu Ayahanda Zainuddin Lubis dan Ibunda Anni Tumiar Sitohang yang telah mendukung dan membantu penulis baik dari segi moral maupun material. Yang selalu mendukung, memotivasi serta memberikan do'a restu kepada penulis untuk maju mencapai cita-cita penulis. Mereka adalah sumber inspirasi dan motivasi penulis dalam melangkah kedepan

untuk pribadi yang jauh lebih baik. Karena dengan do'a restu dan tetesan keringatmu wahai orang tua penulis bisa mencapai cita-cita penulis hari ini telah kudapati apa yang penulis impikan yang telah penulis tempuh dengan cucuran keringat, keyakinan dan kesabaran, engkau telah mengantarku ke hari depan. Dalam penyelesaian pendidikan penulis sampai akhir penulisan skripsi ini kumohon ya Allah semoga mereka selalu dalam lindunganmu Aamiin..

Serta penulis juga mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos.,MSP selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Abrar Adhani ,S.Sos,M.I.Kom selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah SumateraUtara.
4. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos., M.SP selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos,M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Siti Hajar, S.Sos,. M.SP Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, motivasi dan waktu selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

7. Dosen dan seluruh staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat selama penulis mengikuti perkuliahan.
8. Seluruh pegawai staf biro yang telah banyak membantu dalam semua urusan penulis mulai dari perkuliahan sampai akhir pengerjaan skripsi penulis.
9. Kepada Kantor Bupati Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara yang telah memberikan izin penelitian dan penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.
10. Kepada Bapak Fazrinsyah Putra selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Labuhanbatu Utara yang bersedia membantu sebagai narasumber untuk menyelesaikan penelitian.
11. Kepada Bapak Jefri Tambunan selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial Labuhanbatu Utara yang bersedia membantu sebagai narasumber penelitian dan membantu saya dalam menyelesaikan penelitian.
12. Para pegawai di Kantor Bupati Bagian Kesejahteraan Sosial Labuhanbatu Utara yang telah membantu penulis dalam pelaksanaan penelitian.
13. Kepada Abangda dan Kakanda penulis Jalaluddin Lubis, Zulkifli Lubis, Lisma Deni Lubis, Jeffri Rasyiddin Lubis dan Lisna Hanum

Lubis yang telah memberikan semangat dukungan dan juga motivasi serta membantu penulis tanpa hentinya.

14. Teman-teman tersayang Rahma Risa Utami, Yuyun Safrina Cahyani Munthe, Badriya Hasibuan, Afni Lidya dan Adrika Azhari Nst yang selalu memberikan penulis dukungan, motivasi, inspirasi serta selalu ada di suka maupun duka hingga akhir penulisan skripsi ini selesai.
15. Teman-teman terdekat yang penulis sayangi yang selalu ada untuk membantu penulis dan selalu mendukung penulis selama penyusunan skripsi, Aura, Riri, Monica, Aida, Sri, Izmi yang sama-sama berjuang meraih jenjang sarjana.
16. Terimakasih kepada BARAK TAPE sekelompok orang-orang hebat yang selalu kocak di Darat, Laut maupun Udara hingga akhir tulisan penulis selesai yaitu Imanda, Rauf, Parid, Pak Pol, Suhu, Sendi, Alfi, Ginda, Aceh, Aures, Riri, Izmi, Srik
17. Kepada Kakanda Putri Wulandari terimakasih karena selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis saat menyelesaikan skripsi hingga selesai.
18. Kepada teman-teman seperbimbingan skripsi Monica, Imanda, Fariz, dan Shandy terimakasih telah berjuang bersama penulis selama penulisan skripsi ini.
19. Kepada seluruh teman-teman kelas B IAP Kebijakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhirnya kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya persatu secara langsung maupun tidak langsung yang memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya. Semoga mendapatkan balasan dari Allah SWT serta tidak lupa penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang selama penulis duduk diperkuliahan sampai akhir penyelesaian skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi siapa saja yang membacanya demi kemajuan pendidikan dan lebih baik lagi untuk kedepannya Aamiin ya rabbal'amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, 17 Agustus 2022

Lisa Azmi Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II URAIAN TEORITIS.....	10
2.1 Implementasi	10
2.2 Kebijakan Publik	11
2.3 Implementasi Kebijakan Publik.....	13
2.4 Pengertian Beasiswa.....	16
2.5 Pengertian Sumber Daya Manusia	17
BAB III METODE PENELITIAN.....	19
3.1 Jenis Penelitian	19
3.2 Kerangka Konsep	20
3.3 Definisi Konsep.....	21
3.4 Kategorisasi	22
3.5 Narasumber.....	22
3.6 Teknik Pengumpulan Data	24
3.7 Teknik Analisis Data	24
3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	25
3.9 Deskripsi Dan Lokasi Penelitian	26
3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara	26

3.9.2 Visi Dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara.....	27
3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Hasil Penelitian.....	34
4.2 Pembahasan	43
BAB V PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan.....	54
5.2 Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep.....	20
Gambar 3. 2 Bagan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi di Kabupaten
Labuhanbatu Utara 6

Tabel 4. 1 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi di Kabupaten
Labuhanbatu Utara 44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Lembar Pengesahan
- Lampiran II : Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran III : SK-I Permohonan Penetapan Judul
- Lampiran IV : SK-II Surat Penetapan Judul Skripsi Dan Pembimbing
- Lampiran V : SK-III Surat Permohonan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VI : Surat Permohonan Perubahan Judul Skripsi
- Lampiran VII : SK-IV Undangan Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran VIII : SK-V Berita Acara Bimbingan Skripsi
- Lampiran IX : Surat Izin Penelitian Universitas
- Lampiran X : Surat Keterangan Selesai Penelitian
- Lampiran XI : Surat Bebas Pinjaman Buku Perpustakaan
- Lampiran XII : SK-X Undangan Skripsi
- Lampiran XIII : Dokumentasi
- Lampiran XV : Draf Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah salah satu sektor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi kunci dalam pengembangan kemampuan masyarakat yang dapat menjadi alat pendukung dalam bertahan hidup serta suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi (penyusuna kembali) pengalaman yang bertujuan menambah efisiensi individu dalam interaksinya dengan lingkungan.

Perguruan Tinggi merupakan salah satu lembaga pendidikan yang dimana dapat mengembangkan sumber daya manusia dan juga merupakan institusi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam pencapaian tujuan pendidikan secara makro yang perlu melakukan upaya perbaikan secara terus menerus untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keberadaan manusia sebagai sumber daya sangat penting dalam suatu perguruan tinggi karena sumber daya manusia menunjang melalui karya, bakat, kreativitas, dorongan, dan peran nyata. Tanpa adanya unsur manusia dalam perguruan tinggi, tidak mungkin perguruan tinggi tersebut dapat bergerak dan menuju yang diinginkan. Namun di Indonesia, tidak semua individu dapat menempuh pendidikan seperti individu lainnya. Maka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dibentuk program beasiswa sebagai solusi dalam masalah tersebut.

Beasiswa merupakan bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang

dan diberikan kepada perorang mahasiswa. Ataupun berupa bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial. Dengan tujuan membantu mahasiswa agar bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang mempunyai masalah dalam pembiayaan, menciptakan pemerataan suatu ilmu pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya sumber daya manusia baru yang cerdas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk bukti nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam provinsi, kota maupun di Kabupaten.

Program beasiswa miskin adalah program bantuan biaya pendidikan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Penerima Beasiswa miskin ditentukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan oleh Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi.

Hadirnya pemberian beasiswa mahasiswa dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia guna percepatan pembangunan di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pemberian beasiswa mahasiswa bertujuan meningkatkan akses dan pemerataan kesempatan masyarakat Labuhanbatu Utara untuk belajar di Universitas; mempercepat pembangunan baik fisik maupun non fisik, dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dengan bekerja kepada Pemerintah Labuhanbatu Utara setelah di wisuda sampai batas waktu paling lama 4 (lima) tahun apabila dibutuhkan dan diberikan penghasilan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Kebijakan pemerintah untuk mendukung pendidikan yang berkualitas, maka diimplementasikan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, tercantum pengertian pendidikan yang merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Kemudian untuk menindak lanjuti kebijakan ini, maka setiap daerah meneruskan menjadi sebuah peraturan daerah. Maka terbentuklah Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara. Dengan adanya tujuan diimplementasikannya kebijakan ini adalah untuk mendistribusikan beasiswa masyarakat miskin supaya tepat sasaran sesuai atau tidaknya dengan tujuan yang ada didalam peraturan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara bahwa ada beberapa syarat atau karakteristik untuk mendapatkan beasiswa yaitu salah satu caranya adalah dengan mengikuti dan memperhatikan kriteria dan syarat yang ditentukan oleh pemerintah daerah agar dapat diberikan sesuai dengan orang yang membutuhkan dan tepat sasaran.

Sesuai dengan kebijakan tersebut, maka persyaratan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara kepada calon penerima bantuan beasiswa antara lain :

- a. terdaftar ada universitas negeri atau universitas swasta yang masuk melalui jalur undangan, Seleksi Nasional Masuk Universitas Negeri SDMPN serta Ujian Masuk Bersama (UMB) atau melalui jalur/seleksi sejenis;
- b. termasuk program reguler dan bukan program ekstensi atau sejenis;
- c. telah aktif mengikuti perkuliahan minimal 2 (dua) semester;
- d. pada universitas negeri IPK minimal 2,75 untuk program studi eksakta dan minimal 3,0 untuk program studi non eksakta dan pada universitas swasta IPK minimal 3,0 untuk program studi eksakta dan 3,25 untuk program studi non eksakta;
- e. orang tua pemohon terdaftar sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan/atau penerima Beras Miskin (Raskin) dan/atau penerima Program Perlindungan Sosial lainnya;
- f. apabila tidak terdaftar pada program sebagaimana dimaksud dalam huruf e, dapat berupa surat keterangan tidak mampu yang diketahui Camat;
- g. Pendidikan orang tua setinggi-tingginya sarjana atau diploma 4;
- h. IPK yang diajukan paling tinggi semester 6 (enam);
- i. apabila ikut wali maka harus terdaftar dalam Kartu Keluarga minimal 5 (lima) tahun di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Agar dapat mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya implementasi kebijakan terkait pemberian beasiswa yang telah dibuat.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam kebijakan pemerintahan. Implementasi yang dianggap hanya merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan oleh legislative atau para pengambil keputusan, seolah – olah tahapan ini kurang berpengaruh. Akan tetapi dalam kenyataannya, tahapan implementasi menjadi begitu penting karena suatu kebijakan (pemerintah) tidak akan berarti jika tidak dapat dilaksanakan dengan baik, benar serta tepat sasaran. Dengan kata lain implementasi merupakan tahap dimana suatu kebijakan (pemerintah) dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan (*output dan outcome*) kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan (pemerintah) merupakan hal yang sangat penting dari proses kebijakan itu sendiri, karena membawa dampak pada warga negaranya.

Pertanyaan yang menarik sepanjang zaman adalah bagaimana membuat pemerintahan yang efektif dan pemerintahan yang bisa memberi hasil yang maksimal? Dari berbagai penelitian dan pengalaman ternyata pemerintah yang bisa memberi hasil yang maksimal bukan ditentukan oleh pimpinan yang baik hati, jujur dan seterusnya tetapi pemerintah yang menghasilkan kebijakan dan dapat mengimplementasikannya dengan baik. Bahkan banyak Negara berkembang yang membuat kebijakan (pemerintah) yang akhirnya malah menyengsarakan rakyat. Oleh sebab itu implementasi kebijakan publik sangat penting karena kejatuhan dan keberhasilan suatu bangsa ditentukan oleh kehebatan kebijakan publiknya bukan dari sumber daya alam atau politiknya. Sehingga terlihat betapa pentingnya implementasi kebijakan publik untuk dipahami dan diteliti secara mendalam.

Implementasi kebijakan tersebut dapat diterapkan dalam Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2016 yang merupakan suatu rancangan yang ditetapkan oleh Bupati Labuhanbatu Utara sebagai pedoman dalam pemberian beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Berdasarkan realitas yang ada di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara yang menjadi masalah dalam pelaksanaan kebijakan ini salah satunya yaitu masih banyak ditemui dalam penginputan data dan survei lapangan pendaftar pada sektor mahasiswa tidak mampu tetapi faktanya ia dianggap mampu, sehingga dalam artian program beasiswa ini masih ada yang belum tepat sasaran dan masih ada oknum yang menyalahgunakan data yang sebenarnya. Harapan masyarakat di masa mendatang untuk para pelaksana kebijakan dalam proses seleksi program beasiswa Labuhanbatu Utara, akan diperketat baik saat pendaftaran serta penginputan data atau berkas mahasiswa. Sehingga bisa mengurangi bahkan menghilangkan kesalahan yang tidak tepat sasaran dalam pemberian bantuan beasiswa Labuhanbatu Utara.

Tabel 1. 1 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Beasiswa	Tahun	Jumlah Penerima (orang)	Jumlah Target
1	Miskin Berprestasi	2017	300	Sesuai Jumlah Pendaftar Pertahun
2		2018	300	
3		2019	300	
4		2020	300	
5		2021	400	

Sumber : Kantor Bupati Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan tabel diatas mengenai data survey jumlah penerima dan jumlah target beasiswa adalah sesuai dengan jumlah calon pendaftar pertahun yang merupakan masyarakat miskin berprestasi. Namun, fenomena yang terjadi dilapangan masih banyak masyarakat mampu yang lulus dalam program pemberian beasiswa miskin berprestasi.

Untuk itu, penulis melakukan penelitian yang dituangkan dalam skripsi berjudul, **“Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis, penelitian ini akan menambah perspektif civitas akademika prodi ilmu administrasi publik, sebagai bahan kajian dalam proses pelaksanaan kebijakan pemerintah, dalam hal ini di bidang pendidikan tentang pemberian bantuan pendidikan yakni program beasiswa pendidikan.
2. Aspek Praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi pemerintah maupun masyarakat lainnya secara meluas mengenai program pemberian bantuan pendidikan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis, dan konsisten. Agar dapat mengkaji penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari beberapa sub-bab dengan uraian masing-masing dengan substansi sebagai berikut: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Sistematika Penulisan

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini menjelaskan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Pada bab ini pula dimungkinkan mengajukan lebih dari satu teori atau data sekunder/tertier untuk membahas permasalahan yang menjadi topik skripsi, sepanjang teori–teori dan/atau data sekunder/tertier itu berkaitan. Pada bab ini dapat digunakan anggapan dasar untuk penelitian kualitatif dan hipotesis pada penelitian kuantitatif.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan rancangan penelitian, prosedur penelitian, sampel/unit analisis/narasumber penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, dan metode ujinya. Adapun sistematika untuk bab ini sebagai berikut: Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Definisi Operasional (Kuantitatif) /Kategorisasi Penelitian (Kualitatif), Populasi dan sampel (kuantitatif), atau Informan/Narasumber (kualitatif), Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Lokasi dan Waktu Penelitian, Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang hasil pengamatan dan penelitian dari informan

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dan hasil penelitian dan saran saran dari hasil penelitian.

BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1 Implementasi

Implementasi merupakan sebuah penerapan atau pelaksanaan suatu hal. Aktivitas ini memiliki tujuan tersendiri. Dalam penerapannya, implementasi juga dipengaruhi beberapa faktor. Dalam bidang politik, implementasi dipengaruhi oleh beragam faktor lain ; niat legislatif, kapasitas administrasi birokrasi pelaksana, aktivitas kelompok kepentingan dan oposisi, serta dukungan oposisi. Implementasi juga merupakan sebuah aktivitas tertentu yang dibuat untuk mempraktikkan program dengan dimensi yang sudah diketahui. Kegiatan ini dilaksanakan secara rinci sehingga pengamatan bisa mendeteksi keberadaan dan kekuatan dari aktivitas tersebut.

(Wahab dalam webster, 2020) berpendapat implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi pada hakikatnya juga merupakan upaya pemahaman apa yang sebenarnya terjadi setelah program dilaksanakan .

(Rosad, 2019) pengertian implementasi yaitu merupakan proses untuk melaksanakan ide, proses atau seperangkat aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan penyesuaian dalam tubuh birokrasi demi

terciptanya suatu tujuan yang bisa tercapai dengan jaringan pelaksana yang bisa dipercaya.

(Ma'rifatani, 2018) berpendapat bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Tindakan tersebut dilakukan baik oleh individu, pejabat pemerintah ataupun swasta dalam situasi kongkret atau nyata.

(Sahya Anggara, 2014) pengertian implementasi adalah suatu aktivitas dalam melaksanakan program-program yang telah di rumuskan untuk mencapai tujuan organisasi.

(Patel, 2019) berpendapat bahwa implementasi serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkup lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditunjukkan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Dari berbagai defenisi para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan (pemerintah) dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapau tujuan (output dan outcome) kebijakan itu sendiri.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi dapat dilaksanakan secara optimal dengan adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung untuk program pemberian beasiswa. Kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan dari pada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak

dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan. Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.

(Putri et al., 2018) berpendapat bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang tidak dilakukan atau dilakukan oleh sekelompok manusia atau pemerintah yang bertujuan memecah masalah-masalah publik untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan dan kebutuhan seluruh masyarakat luas.

(Priyatin & Rahmi, 2022) berpendapat bahwa kebijakan publik merupakan suatu rangkaian pilihan-pilihan yang saling berhubungan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah pada bidang-bidang yang menyangkut tugas-tugas pemerintahan, seperti pertahanan, keamanan, energy, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan masyarakat, kriminalitas, perkotaan dan lain-lain.

(Apriandi, 2017) mengemukakan bahwa kebijakan publik menyangkut beberapa hal, yaitu : pertama, hal-hal yang telah diputuskan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan. Kedua, berbentuk peraturan pemerintah secara tertulis maupun konvensi-konvensi. Ketiga, merupakan perwujudan kerjasama badan legislative dan badan eksekutif.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

2.3 Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah, akan tetapi pelaksanaan menurut adanya syarat, antara lain adanya orang pelaksana dan kemampuan keorganisasian. Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapat sumber daya tambahan dalam melaksanakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi.

(Patel, 2019) juga menjelaskan bahwa konsep implementasi kebijakan dipandang sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang individu, pejabat atau kelompok pemerintah ataupun swasta, yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan dan diputuskan.

(Palit & Palar, 2022) berpendapat, Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aktivitas dari administrasi publik sebagai suatu institusi, artinya salah satu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit-unit administratif atau unit-unit birokrasi pada berbagai tingkat pemerintahan baik bersifat vertikal maupun horizontal dalam proses kebijakan publik.

(Putri et al., 2018) berpendapat bahwa implementasi kebijakan publik merupakan suatu tindakan- tindakan kegiatan yang penting untuk merelisasikan atau melaksanakan program yang telah disusun untuk tercapainya tujuan program yang telah direncang atau direncanakan sebelumnya yang dilakukan oleh organisasi publik. Keberhasilan suatu implementasi bisa diukur dari keberhasilan tujuan akhir yang telah diraih sedangkan implementasi program dapat tercapai jika antara program, pelaksanaan, dan kelompok sasaran tepat terhadap kesesuaian tujuan dalam pelaksanaannya.

Dari beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.

Model implementasi kebijakan publik yang relevan dengan implementasi kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia :

Menurut Edward III, mengajukan empat faktor atau variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan Implementasi kebijakan, yaitu diantaranya meliputi variabel atau faktor Komunikasi, Sumber daya, Disposisi, dan Struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif Komunikasi diartikan sebagai proses penyimpanan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi

kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (Policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

2. Sumber Daya

Sumber daya penting bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias.

4. Struktur Birokrasi

Yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia, atau para kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi.

2.4 Pengertian Beasiswa

(Daniel Lenox, 2009), berpendapat bahwa beasiswa adalah hibah yang diberikan untuk meningkatkan atau mengimbangi kesempatan belajar bagi siswa yang berjuang untuk membayar pendidikan karena krisis ekonomi, terutama yang memiliki manfaat akademik.

Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan diberikan kepada perorang mahasiswa. Ataupun berupa bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial. Dengan tujuan membantu mahasiswa agar bisa mencari ilmu sesuai dengan bidang yang ingin dikuasai, terutama bagi yang mempunyai masalah dalam pembiayaan, menciptakan pemerataan suatu ilmu pendidikan kepada setiap orang yang membutuhkan, meningkatkan kesejahteraan dan terciptanya sumber daya manusia baru yang cerdas. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk bukti nyata dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan baik dalam provinsi, kota maupun di Kabupaten.

2.5 Pengertian Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan dan kualitas. Sumber daya manusia (SDM) adalah komponen penting yang berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi pada sebuah organisasi. Dengan adanya kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi maka kebijakan ini harus diimplementasikan dengan baik.

(Subekti et al., 2017), berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi karena kinerja mereka sangat diperhitungkan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata terhadap jalannya usaha mengingat perannya yang besar bagi kesuksesan dan keberlangsungan sebuah organisasi tidak terlepas dari dukungan melalui kualitas kerja yang diberikannya.

(Saputra et al., 2016) menyatakan bahwa, sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal, perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, dorongan, daya dan karya (rasio, rasa dan karsa). Semua potensi sumber daya manusia tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan. Betapa pun majunya teknologi, perkembangan informasi, tersedianya modal dan memadainya bahan, jika tanpa sumber daya manusia sulit bagi organisasi itu untuk mencapai tujuannya.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. (Rahman, 2019) mendefinisikan penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

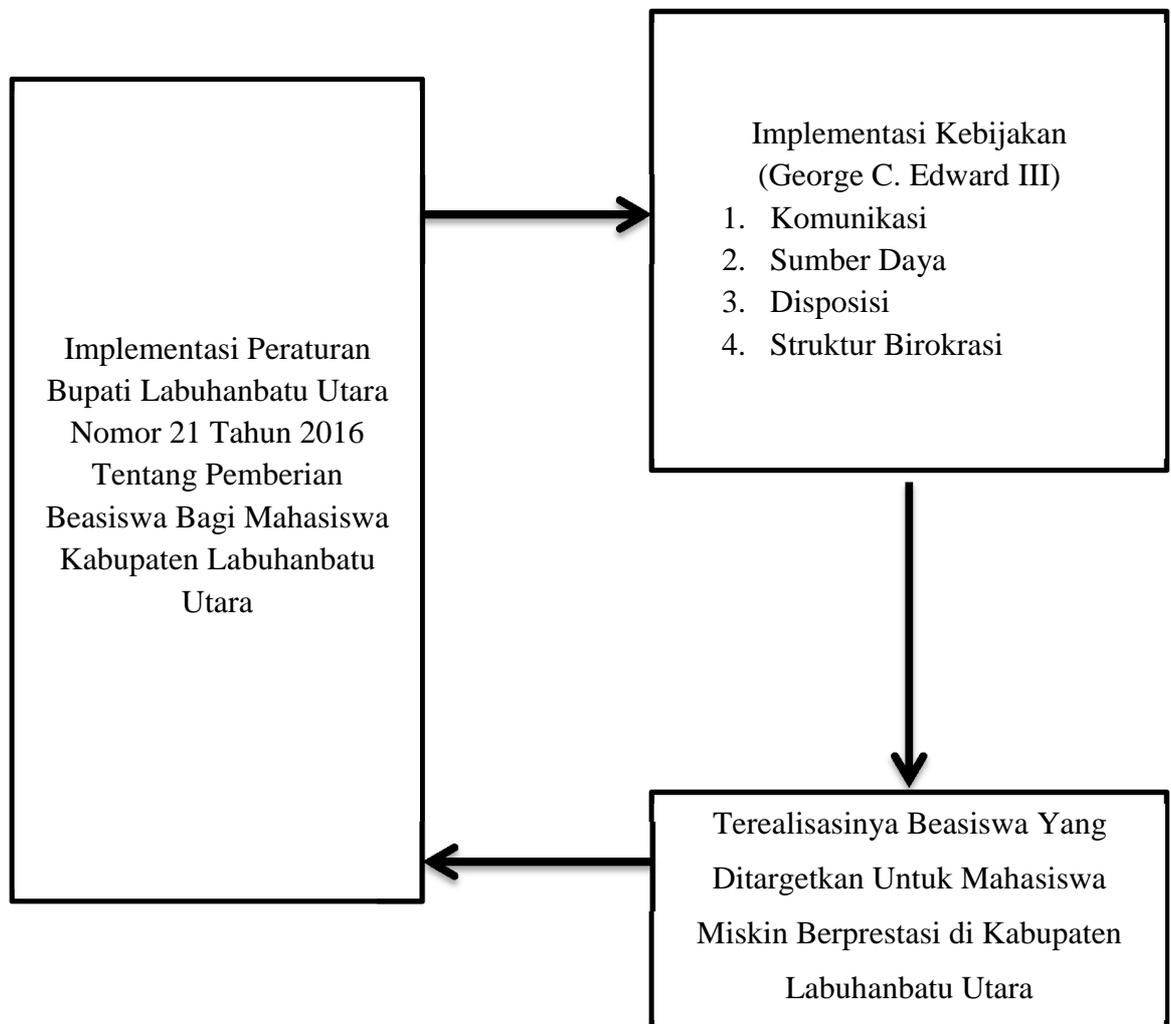
Menurut Amrizal dkk (Yusriati et al., 2021). Metode penelitian deskriptif bersifat aktual dan mengumpulkan data serta informasi. Untuk pengolahan data dilakukan dengan metode kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui wawancara terhadap key informan dan narasumber penelitian, kemudian data dan informasi yang diperoleh langsung dianalisis menggunakan teknik analisis katagorisasi.

(Lestari & Widodo, 2018) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif kualitatif, data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh adanya metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan dan lain-lain.

3.2 Kerangka Konsep

Konsep merupakan istilah khusus yang digunakan para ahli dalam upaya menggambarkan secara cermat tentang fenomena sosial yang diteliti, untuk menghindari salah pengertian atas makna konsep-konsep yang akan dijadikan objek penelitian.

Gambar 3. 1 Kerangka Konsep



3.3 Definisi Konsep

Definisi konsep merupakan pembelajaran tentang konsep-konsep yang telah dikelompokkan kedalam variabel agar lebih terarah. Jadi, jelasnya definisi konsep dimaksud untuk merubah konsep-konsep yang berupa konstitusi dengan kata-kata yang menggunakan perilaku atau gejala yang dapat ditemukan oleh orang lain kebenarannya. Berkaitan dengan hal ini, maka dalam penelitian ini, digunakan konsep-konsep sebagai berikut:

- a. Implementasi adalah tahap dimana suatu kebijakan (pemerintah) dilaksanakan secara maksimal dan dapat mencapai tujuan (output dan outcome) kebijakan itu sendiri.
- b. Kebijakan Publik kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.
- c. Implementasi Kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.
- d. Beasiswa adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa sebagai bentuk apresiasi prestasi kepada mahasiswa, yang berupa uang dan

diberikan kepada perorang mahasiswa. Ataupun berupa bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang mempunyai keterbatasan finansial.

- e. Sumber daya manusia adalah salah satu yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan.

3.4 Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variable penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategori penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut. Kategorisasi dalam penelitian ini adalah implementasi peraturan bupati Labuhanbatu Utara No 21 Tahun 2016 Tentang Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Berikut beberapa kategorisasi dalam penelitian ini yaitu :

- a. Adanya komunikasi atau penyampaian dalam kebijakan
- b. Adanya sumber daya dalam kebijakan
- c. Adanya disposisi pelaksanaan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
- d. Adanya struktur birokrasi koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

3.5 Narasumber

Untuk melengkapi data-data yang akan dianalisis secara kualitatif, maka peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dari penelitian ini adalah:

1. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

Nama : Fazrinsyah Putra

Usia : 53 Tahun

Pendidikan : Pascasarjana (S2)

Jabatan : Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial

2. Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

Nama : Jefri Tambunan

Usia : 41 Tahun

Pendidikan : Sarjana (S1)

Jabatan : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial

3. Masyarakat I (Penerima Beasiswa)

Nama : Alysia Arnopi Munthe

Usia : 20 Tahun

Pendidikan : SMA

Jabatan : Mahasiswa

4. Masyarakat II (Tidak Menerima Beasiswa)

Nama : Nur Aini

Usia : 21 Tahun

Pendidikan : SMA

Jabatan : Wiraswasta

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data serta keterangan dari narasumber, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya. Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah teknik pengumpulan data lapangan dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, maupun elektronik. Dokumen yang diperoleh kemudian dianalisis, dibandingkan dan dipadukan membentuk suatu kajian yang sistematis, padu dan utuh.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data-data yang diperoleh di lapangan baik berupa catatan di lapangan, gambar, dokumen dan lainnya diperiksa kembali, diatur, dan kemudian diurutkan.

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Humberman yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data digunakan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.

b. Penyajian Data

Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencrinya sewaktu-waktu. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan langkah akhir dalam analisis data. Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan sinergis.

3.8 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang akan diteliti dalam mencari dan mengumpulkan data yang dibutuhkan saat melakukan penelitian. Adapun yang menjadi lokasi penelitian adalah Kantor Bupati Labuhanbatu Utara Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara. Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai dari bulan Mei 2022 sampai dengan bulan Juni 2022.

3.9 Deskripsi Dan Lokasi Penelitian

3.9.1 Gambaran Umum Kabupaten Labuhanbatu Utara

Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai salah satu kabupaten yang berada kawasan Pantai Timur Provinsi Sumatera Utara yang terletak 99.25.00o – 100.05.00o Bujur Timur dan 01o58'00'' – 02o50'00'' Lintang Utara dengan ketinggian 0 – 2.151 meter di atas permukaan laut. Kabupaten ini memiliki wilayah seluas 354.580 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Asahan dan Selat Malaka;
2. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Labuhanbatu dan Kabupaten Padang Lawas Utara;
3. Sebelah Barat dengan Kabupaten Tapanuli Utara; dan Kabupaten Toba Samosir;
4. Sebelah Timur dengan Kabupaten Labuhanbatu.

Sebutan Labuhanbatu bermula ketika pada tahun 1862 Angkatan Laut Belanda datang ke sebuah kampung di Hulu Labuhanbilik tepatnya di Desa Sei Rakyat sekarang. Di kampung ini Belanda membangun tempat pendaratan kapal dari batu beton. Tempat ini berkembang menjadi tempat persinggahan dan pendaratan kapal yang kemudian menjadi kampung besar dengan nama Pelabuhanbatu. Masyarakat mempersingkat sebutannya menjadi Labuhanbatu, nama ini kemudian melekat dan ditetapkan menjadi nama wilayah Kabupaten Labuhanbatu.

Sebelum kemerdekaan di wilayah Kabupaten Labuhanbatu terdapat 4 kesultanan, yaitu :

1. Kesultanan Kota Pinang berkedudukan di Kota Pinang
2. Kesultanan Kualuh berkedudukan di Tanjung Pasir
3. Kesultanan Bilah berkedudukan di Negeri Lama
4. Kesultanan Panai berkedudukan di Labuhanbilik

Setelah kemerdekaan keempat kesultanan ini menjadi wilayah Kabupaten Labuhanbatu sesuai ketetapan komite nasional daerah keresidenan Sumatera Timur tanggal 19 Juni 1946.

Kabupaten Labuhanbatu Utara adalah pemekaran dari Kabupaten Labuhanbatu berdasarkan Undang-undang No.23 tahun 2008 tanggal 21 Juli 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Labuhanbatu Utara lahir dari tuntutan aspirasi masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Wilayah Labuhanbatu Utara.

3.9.2 Visi Dan Misi Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam rangka mencapai visi yang telah ditetapkan maka visi tersebut diimplementasikan kedalam beberapa misi pembangunan sebagai berikut :

Adapun Visinya yaitu :

Kabupaten yang beriman dan bertakwa menuju labuhanbatu utara yang sejahtera.

Adapun Misinya yaitu :

1. Reformasi birokrasi yang berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa berlandaskan iman dan takwa; Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana, fasilitas sosial dan umum masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mandiri berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) dan Iman dan Takwa (IMTAK);
3. Membangun dan mengembangkan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya lokal dan berwawasan lingkungan; dan
4. Meningkatkan standar hidup layak, keamanan dan kenyamanan.

3.9.3 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Kabupaten Labuhanbatu Utara

a. Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten

TUGAS POKOK

Mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.

FUNGSI

1. Pengoordinasian penyusunan Kebijakan Daerah.
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Satuan Kerja Perangkat Daerah.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Kebijakan Daerah.

4. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara Daerah.

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Uraian Tugas Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

TUGAS POKOK

Membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, hukum, dan kerja sama, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerja sama.

FUNGSI

1. Penyusunan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama.
2. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan rakyat.
3. Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama.
4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tata pemerintahan, hukum dan kerja sama.

5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat.

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di bidang tata pemerintahan, hukum, kesejahteraan rakyat dan kerja sama yang berkaitan dengan tugasnya.

c. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat

TUGAS POKOK

Melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

FUNGSI

1. Penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

3. Penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak

yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan yang berkaitan dengan tugasnya.

d. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Koordinator Bina Mental Spiritual Mental

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang bina mental spiritual.

e. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Koordinator Kesejahteraan Sosial

TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan sosial.

**f. Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Sub Koordinator
Kesejahteraan Masyarakat**

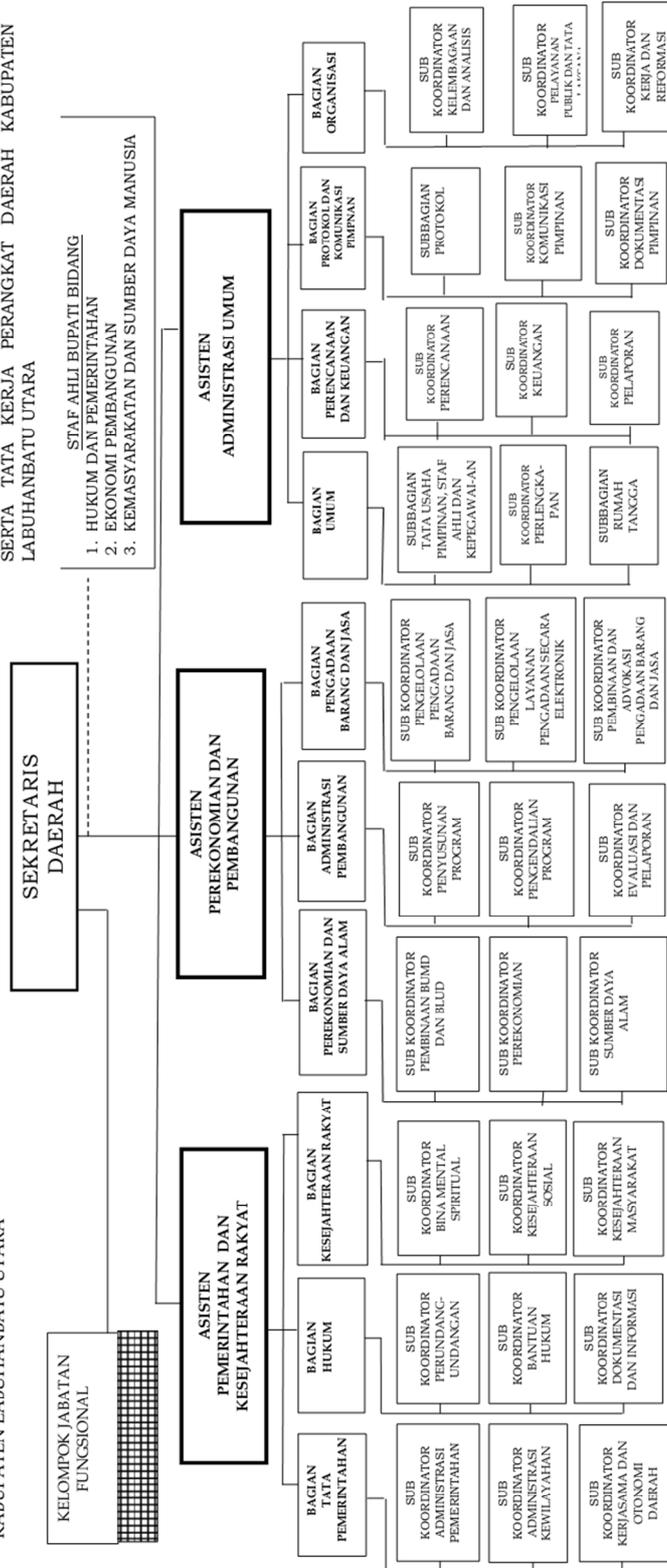
TUGAS POKOK

Melaksanakan sebagian tugas Bagian Kesejahteraan Sosial dalam menyiapkan perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi di bidang kesejahteraan masyarakat.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR TAHUN 2022

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

A. BAGAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU UTARA



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini membahas dan menyajikan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan atau dikenal dengan pendekatan kalitatif yaitu data yang diperoleh dengan cara Tanya jawab atau wawancara dengan narasumber sehingga memberikan gambaran yang jelas dan kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh peneliti yang ada dilapangan melalui wawancara secara langsung oleh beberapa informan di Kantor Bupati Labuhanbatu Utara terkait dengan Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Untuk mendukung perolehan data maka akan dideskripsikan atau dengan kata lain akan menjelaskan hasil wawancara terutama yang terkait dengan tingkat karakteristik jawaban narasumber.

Dengan hasil wawancara dari narasumber penulis dapat menyajikan datanya meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

a. Adanya Komunikasi Atau Penyampaian Dalam Kebijakan

Bapak Fazrinsyah Putra selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 09:45 WIB kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau

mengatakan bahwa proses komunikasi berjalan dengan baik melalui media sosial ataupun media online yang resmi di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Atau melalui orang pemerintahan, misalnya anggota bagian Kesejahteraan sosial (Kesra) menyampaikan secara lisan kepada masyarakat tempat dia berdomisili.

Menurut Bapak Jefri Tambunan selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pada pukul 11:15 WIB dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa proses komunikasi berjalan dengan baik melalui koordinasi yang telah disusun oleh panitia. Ada juga yang melalui media sosial ataupun website resmi yang telah di upload.

Selanjutnya Alysia Arnopi Munthe selaku Masyarakat Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada pukul 13:36 WIB dalam kaitannya dengan proses komunikasi pelaksanaan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa penyampaian informasi beasiswa miskin berprestasi disampaikan secara baik.

Sementara Nur Aini selaku masyarakat yang tidak menerima program pemberian beasiswa miskin berprestasi dalam wawancara pada hari Rabu 8 Juni 2022 pada pukul 10:18 WIB, beliau mengatakan dalam kaitannya dengan proses komunikasi dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi berjalan dengan baik, tetapi masih terdapat kendala seperti

keterbatasan dalam bermedia sosial. Karena, tidak semua masyarakat memiliki media sosial untuk mengetahui mengenai beasiswa miskin berprestasi miskin ini serta sosialisasi yang dilaksanakan tidak semua mengetahuinya. Sehingga banyak masyarakat belum mengetahui program tersebut.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam program beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara dalam penyampaian informasi masih kurang berjalan dengan baik. Menurut panitia sudah berjalan dengan baik, tapi tidak dengan masyarakat yang tidak menerima, menurutnya masih kurang baik. Sehingga proses komunikasi harus ditingkatkan lagi agar informasi dapat tersampaikan dengan baik mengenai program tersebut dan sampai ke masyarakat yang lainnya.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Dalam Kebijakan

Bapak Fazrinsyah Putra selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 09:45 WIB kaitannya dengan sumber daya manusia dalam kebijakan dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi, beliau mengatakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi sudah baik dan menguasai dibidangnya masing-masing. Karena kami juga sudah diamanahkan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Tentu kami sudah melaksanakannya dengan baik. Untuk tolak ukur efektif atau tidak efektifnya mungkin publik yang bisa menilai. Tapi sepanjang kami

menjalankannya kami rasa sudah efektif. Untuk kendala yang dihadapi menurut pengalaman kami adalah terkadang pemohon yang bersangkutan tidak langsung menyampaikan permohonan kepada kami. Biasanya pemohon menggunakan perantara karena pemohon tidak percaya diri 100%. Mereka menganggap kalau dengan pemerintahan akan dipersulit, padahal sebenarnya tidak. Sehingga terkadang apa yang menjadi informasi penting dalam penyiapan berkas tidak tersampaikan secara langsung kepada pemohon.

Menurut Bapak Jefri Tambunan selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pada pukul 11:15 WIB dalam kaitannya dengan proses dengan sumber daya manusia dalam kebijakan dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi, beliau mengatakan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi sudah menguasai dibidangnya masing-masing. Dan jika ada masalah kami berkoordinasi kepada pihak yang menerima program beasiswa miskin berprestasi. Kendala yang dihadapi adalah masih banyak masyarakat yang belum mengetahui informasi mengenai program tersebut. Padahal pihak kami sudah menginformasikan secara media sosial dan di website resmi.

Selanjutnya Alysia Arnopi Munthe selaku Masyarakat Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada pukul 13:36 WIB dalam kaitannya dengan proses sumber daya manusia dalam pemberian beasiswa miskin berprestasi di

Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan pelaksanaan programnya sudah baik. Karena sudah mampu menguasai bidangnya masing-masing dan sangat membantu saya dalam penerimaan program beasiswa tersebut.

Sementara Nur Aini selaku masyarakat yang tidak menerima program pemberian beasiswa miskin berprestasi dalam wawancara pada hari Rabu 8 Juni 2022 pada pukul 10:18 WIB, beliau mengatakan dalam kaitannya dengan proses sumber daya manusia dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, sudah berjalan dengan baik. Tetapi ada kendala dalam pendataan masyarakat yang seharusnya menerima dan tidak menerima. Kendala tersebut adalah panitia yang tidak memandang dengan benar tanpa melihat secara keseluruhan dari data pemohon. Maka dari itu masyarakat yang seharusnya menerima beasiswa tersebut tidak mendapatkan karena proses pendataan tidak dilakukan dengan prosedur yang benar.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam sumber daya manusia yaitu bahwa dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi masih dikatakan kurang baik dalam pelaksanaannya. Tetapi menurut dari Kesejahteraan Sosial sendiri mereka merasa sudah cukup baik dalam sumber daya dalam menjalankan tugas. Tetapi setelah melakukan wawancara terhadap narasumber yang tidak menerima beasiswa tersebut mengatakan sumber dayanya masih kurang baik. Dikarenakan kendala

seperti panitia yang tidak memandang dengan benar tanpa melihat secara keseluruhan dari data pemohon.

c. Adanya Disposisi Pelaksanaan Yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan

Bapak Fazrinsyah Putra selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 09:45 WIB kaitannya dengan proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan sudah diatur didalam peraturan sebagai regulasinya dan sudah ada ketentuannya. Strategi yang dijalankan dalam memilih penerima beasiswa akan diverifikasi secara factual dan administrasi. Setelah diverifikasi maka akan dicrosscheck ke universitas yang terkait dengan keabsahan datanya. Kemudian yang terakhir akan survey kelapangan. Kendala yang timbul pada setiap program ini adalah penyaluran realisasi yang terlambat.

Bapak Jefri tambunan selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pada pukul 11:15 WIB kaitannya dengan proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan sudah berjalan baik dengan proses yang terstruktur. Kepanitian dalam Kesejahteraan Sosial sudah menjalankan tugas dengan

baik sebagaimana yang telah diberikan tugas dan amanah dari Kepala Kesejahteraan Sosial.

Selanjutnya Alysia Arnopi Munthe selaku Masyarakat Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada pukul 13:36 WIB dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan dalam pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan sudah berjalan dengan baik. Dalam pengimpletasiannya panitia yang bersangkutan sudah menjalankan sesuai prosedur.

Sementara Nur Aini selaku masyarakat yang tidak menerima program pemberian beasiswa miskin berprestasi dalam wawancara pada hari Rabu 8 Juni 2022 pada pukul 10:18 WIB, beliau mengatakan dalam kaitannya dengan proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa belum terjalankan dengan baik. Karena, dimana ditemukan masih banyaknya yang tidak miskin yang menerima beasiswa. Penetapan sasaran penerima beasiswa masih lemah, dimana yang bukan berasal dari keluarga miskin menerima beasiswa dan yang berasal dari keluarga miskin tidak menerima.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan dalam implementasi kebijakan masih kurang efesien. Dimana dilapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Banyak data-data yang

masih tidak valid untuk menjadi bagian dari program penerima beasiswa miskin berprestasi miskin ini.

d. Adanya Struktur Birokrasi Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Bapak Fazrinsyah Putra selaku Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Senin 23 Mei 2022 pukul 09:45 WIB kaitannya dengan proses koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan bahwa terkait dengan pemberian beasiswa miskin berprestasi ini kami sudah melakukan sosialisasi untuk berkoordinasi. Sosialisasi langsung ke orang-orang tetapi masih terbatas dalam anggaran sehingga tidak sampai ke desa lainnya yang ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Jadi, sebagian kami informasikan di media online resmi. Kendala yang dihadapi dalam hubungan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan saya rasa tidak ada yang serius. Kami secara garis factual langsung berhubungan dengan pemerintah yang telah diberikan langsung dari Bupati.

Bapak Jefri tambunan selaku Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dalam wawancara yang dilakukan pada hari Selasa 31 Mei 2022 pada pukul 11:15 WIB kaitannya dengan proses koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan proses koordinasi sudah berjalan dengan baik. Tapi terkadang masih ada waktu yang terbentur. Karena sudah

barang tentu setiap kebijakan yang baru dilahirkan apalagi yang sifatnya kebijakan lokal yang tidak serta merta menjadi urusan wajib didalam pemerintahan. Baik dari pemerintahan pusat sampai kedaerah, kemungkinan durasi waktunya yang sulit diatur. Untuk kebijakan pemberian beasiswa ini adalah merupakan kebijakan daerah pemerintah kabupaten itu sendiri. Tidak melalui pemerintah pusat, otomatis cara actionnya harus kita sesuaikan juga mengacu kepada ketentuan yang lebih tinggi dari peraturan.

Selanjutnya Alysia Arnopi Munthe selaku Masyarakat Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi dalam wawancara yang dilakukan pada hari Kamis 2 Juni 2022 pada pukul 13:36 WIB dalam kaitannya dengan proses koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam pemberian beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan sudah berjalan dengan baik.

Sementara Nur Aini selaku masyarakat yang tidak menerima program pemberian beasiswa miskin berprestasi dalam wawancara pada hari Rabu 8 Juni 2022 pada pukul 10:18 WIB, beliau mengatakan dalam kaitannya dengan proses koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara, beliau mengatakan untuk itu saya kurang mengetahui. Mungkin itu sudah diatur dan dijalankan sebagaimana mestinya setelah berkoordinasi.

Dengan demikian, kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam koordinasi terhadap

keberhasilan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Namun, adapun kendalanya yaitu keterbatasan waktu yang diberikan dari pemerintah lokal. Sehingga proses yang dilaksanakan sangat memakan waktu yang singkat. Hal ini menjadi kendala dalam koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan uraian penyajian diatas, maka dalam pembahasan sub bab ini merupakan kajian atau analisis data dari hasil wawancara dengan para narasumber di Kabupaten Labuhanbatu Utara. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terlebih dahulu, yaitu meliputi analisis data sebagai berikut :

a. Adanya Komunikasi Atau Penyampaian Dalam Kebijakan

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari, ditempat pekerjaan, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangat penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya pengetahuan manusia dari hari ke hari karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lain, maka dari itu komunikasi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Komunikasi yang baik yaitu berbicara dengan efektif artinya tidak bertele-tele, tidak berputar-putar untuk menyampaikan suatu poin pembicaraan. Cepat, tepat, lugas dan dapat dimengerti oleh lawan bicara.

Berbicara efektif membuat lawan bicara akan fokus pada setiap hal yang disampaikan dan dapat mempengaruhi langsung ke dalam pikirannya. Sedangkan komunikasi yang tidak efektif memungkinkan timbulnya banyak kesalahpahaman yang memicu konflik. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan adalah dalam program beasiswa miskin berprestasi di Kesejahteraan Sosial dalam penyampaian informasi masih kurang berjalan dengan baik. Menurut panitia sudah berjalan dengan baik, tapi tidak dengan masyarakat yang tidak menerima, menurutnya masih kurang baik. Sehingga proses komunikasi harus ditingkatkan lagi agar informasi dapat tersampaikan dengan baik mengenai program tersebut dan sampai ke masyarakat yang lainnya.

Tabel 4. 1 Jumlah Penerima Beasiswa Miskin Berprestasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara

No	Beasiswa	Tahun	Jumlah Penerima (orang)	Jumlah Target
1	Miskin Berprestasi	2017	300	Sesuai Jumlah Pendaftar Pertahun
2		2018	300	
3		2019	300	
4		2020	300	
5		2021	400	

Sumber : Kantor Bupati Bagian Kesejahteraan Sosial Kabupaten Labuhanbatu Utara

Berdasarkan tabel diatas merupakan perolehan capaian target penerima beasiswa miskin berprestasi sesuai dengan pendaftar setiap tahunnya. Dari

data tersebut terlihat jelas bahwa komunikasi dalam suatu implementasi kebijakan memiliki peran penting sehingga suatu kebijakan tersebut dapat dijalankan.

Hal ini sesuai dengan Edward III mengenai komunikasi. Agar implementasi menjadi efektif Komunikasi diartikan sebagai proses penyimpanan informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (Policy maker) kepada pelaksana kebijakan (policy implementors). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami apa yang menjadi isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (target groups) kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mempersiapkan dengan benar apa yang harus dipersiapkan dan lakukan untuk melaksanakan kebijakan publik agar apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Seperti yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial yang khusus menangani pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi bahwa proses komunikasi telah dilaksanakan antara pembuat kebijakan yaitu Bupati Labuhanbatu Utara kepada pelaksana kebijakan yaitu perangkat bagian Kesejahteraan Sosial, namun terdapat beberapa kendala dalam proses komunikasi tersebut yaitu penyampaian informasi yang kurang merata kepada kelompok sasaran. Sehingga, masyarakat tidak sepenuhnya

mengetahui bahwa di Kabupaten Labuhanbatu Utara terdapat program beasiswa miskin berprestasi.

Hal ini sejalan dengan (Siahaan & Adrian, 2021) menjelaskan bahwa komunikasi dapat efektif apabila penerima pesan menginterpretasikan pesan yang diterimanya seperti yang dimaksudkan pengirimnya.

Seperti yang terjadi di masyarakat Kabupaten Labuhanbatu Utara, masyarakat sudah dapat menerima pesan dan menginterpretasikan pesan yang diterima dari pemerintah atau pengirim pesan dengan baik. Dilihat dengan adanya implementasi-implementasi yang dilakukan masyarakat berdasarkan himbauan dari pesan yang disampaikan. Namun, jika informasi tersebut disampaikan tidak secara luas dan merata maka informasi tersebut tidak tersampaikan dengan tepat kepada sasaran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, (Utami, 2021) tentang komunikasi dalam program pemberian beasiswa daerah di Kabupaten Lamandau bahwa komunikasi antara pelaksana program dengan masyarakat (mahasiswa) masih belum optimal, hal ini dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan peneliti. Bahwa, kurangnya melakukan sosialisasi tentang program pemberian beasiswa daerah terhadap mahasiswa, sehingga dapat mempersulit mahasiswa untuk mengetahui informasi, perubahan yang dibuat secara spontan dan mempersulit dalam mendapatkan informasi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis.

b. Adanya Sumber Daya Manusia Dalam Kebijakan

Sumber daya manusia merupakan bagian dari dalam suatu kemajuan ilmu, pembangunan, dan teknologi. Oleh karena itu dalam era sekarang ini dimana teknologi dan peradaban sudah sangat maju, menuntut sumber daya manusia yang berkompeten yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan peran dan fungsinya baik untuk individual maupun tujuan organisasional.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah di Kesejahteraan Sosial dalam sumber daya manusia yaitu bahwa dalam pelaksanaan program beasiswa miskin berprestasi masih dikatakan kurang baik dalam pelaksanaannya. Tetapi menurut dari Kesejahteraan Sosial sendiri mereka merasa sudah cukup baik dalam sumber daya dalam menjalankan tugas.

Hal ini sesuai dengan Edward III mengenai Sumber daya penting bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan, serta bagaimanapun akuratnya penyampaian ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber daya untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan efektif. Seperti yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan kebijakan harus menguasai bidangnya masing-masing

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi agar implementasi kebijakan tersebut dapat dijalankan dengan baik.

Hal ini sejalan dengan (Sulaeman et al., 2022), berpendapat bahwa sumber daya manusia adalah salah satu unsur yang paling vital bagi organisasi karena kinerja mereka sangat diperhitungkan untuk mewujudkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan. Keberadaannya tidak dapat dipandang sebelah mata terhadap jalannya usaha mengingat perannya yang besar bagi kesuksesan dan keberlangsungan sebuah organisasi tidak terlepas dari dukungan melalui kualitas kerja yang diberikannya.

Sumber Daya Manusia di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial sudah berjalan dengan baik. Namun, fenomena yang terjadi dilapangan dilihat dari sudut pandang narasumber yang tidak menerima beasiswa miskin berprestasi tersebut bahwasanya sumber daya manusia yang ada di kantor tersebut masih perlu adanya peningkatan kinerja dalam pelaksanaan implementasi kebijakan. Terutama dari segi pelayanan yang dianggap masih belum efektif.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, (Utami, 2021) tentang sumber daya dalam program pemberian beasiswa daerah di Kabupaten Lamandau bahwa sumber daya akan berhasil atau tidaknya suatu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan suatu program, tentunya tidak lepas dari sumber daya para implementor kebijakan program tersebut. Walaupun isi kebijakan sudah di komunikasikan secara baik apabila para implementornya

kekurangan sumber daya untuk melaksanakan maka program tidak akan berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis.

c. Adanya Disposisi Pelaksanaan Yang Dilakukan Dalam Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik (public policy proses) sekaligus studi yang sangat crucial. Bersifat crucial karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, begitu pula sebaliknya. Pelaksanaan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan diharuskan agar terimplementasikan sebagaimana yang seharusnya. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan implementasi kebijakan masih kurang efisien. Dimana dilapangan masih banyak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Banyak data-data yang masih tidak valid untuk menjadi bagian dari program penerima beasiswa miskin berprestasi miskin ini.

Hal ini sesuai dengan Edward III mengenai Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa

yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam prakteknya tidak terjadi bias. Seperti yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan disposisi yang dilakukan mengatakan bahwa proses pelaksanaan dalam implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik dengan proses yang terstruktur. Kepanitiaan dalam kesejahteraan sosial sudah menjalankan tugas dengan baik sebagaimana yang telah diberikan tugas dan amanah dari kepala kesejahteraan sosial. Namun, terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan kembali yaitu bidang sikap para pelaksana yang masih kurang maksimal dalam implementasi kebijakan.

Sejalan dengan pendapat (Subekti et al., 2017), disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan fenomena yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial bahwa sikap pelaksana yang kurang efektif penyebab timbulnya kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan. Seperti penyaluran realisasi yang terlambat.

Dengan demikian pelaksanaan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan belum terjalankan dengan baik. Karena, dimana ditemukan masih banyaknya yang tidak miskin yang menerima beasiswa. Penetapan sasaran penerima beasiswa masih lemah, dimana yang bukan berasal dari keluarga

miskin menerima beasiswa dan yang berasal dari keluarga miskin tidak menerima.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, (Utami, 2021) tentang disposisi dalam program pemberian beasiswa daerah di Kabupaten Lamandau bahwa disposisi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lamandau sudah dijalankan dengan baik untuk pengangkatan birokratnya dengan membentuk tim-tim yang disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. Untuk pemberian intensif tambahan itu ada. Petugas pelaksana program diberikan intensif sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Tentunya dengan adanya pemberian intensif tambahan akan memacu semangat dan ketekunan lagi bagi para pelaksana program pemberian beasiswa daerah kabupaten lamandau dengan demikian maka program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau akan berjalan dengan optimal. Hal ini tidak sesuai dengan hasil penelitian penulis.

d. Adanya Struktur Birokrasi Koordinasi Terhadap Keberhasilan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tindakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya terhadap pengambilan keputusan. Implementasi kebijakan publik adalah tahapan penting dalam realisasi kebijakan publik secara komprehensif. Koordinasi adalah suatu upaya yang sinkron dan teratur demi menyediakan jumlah serta waktu yang tepat, dan juga mengarahkan pelaksanaan untuk bisa melahirkan suatu

tindakan yang selaras dan harmonis pada tujuan yang sebelumnya sudah ditentukan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil wawancara terhadap para narasumber diatas adalah Kesejahteraan Sosial dalam koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik. Namun, adapun kendalanya yaitu keterbatasan waktu yang diberikan dari pemerintah lokal. Sehingga proses yang dilaksanakan sangat memakan waktu yang singkat. Hal ini menjadi kendala dalam koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan.

Hal ini sesuai dengan Edward III mengenai Struktur Birokrasi yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan yang tersedia, atau para kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Seperti yang terjadi di Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara bagian Kesejahteraan Sosial dalam pelaksanaan struktur birokrasi yang ada di kantor tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai SOP yang telah ditentukan. Setiap bidang-bidang yang ada di struktur birokrasi tersebut telah melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa ada penyelewengan jabatan dalam pelaksanaan implementasi.

Sejalan dengan pendapat (Subekti et al., 2017) struktur birokrasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap efektivitas

implementasi. Ketika struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka hal ini akan menyebabkan ketidak efektifan dan menghambat jalanya pelaksanaan kebijakan. Pendapat ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Edward III bahwa implementasi suatu kebijakan dapat berjalan apabila struktur organisasi berjalan dengan kondusif. Dengan demikian dalam koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, (Utami, 2021) tentang struktur birokrasi dalam program pemberian beasiswa daerah di Kabupaten Lamandau bahwa dalam struktur birokrasi yang sangat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan publik yaitu Standart Operating Procedur (SOP). SOP adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pelaksana kebijakan melaksanakan kebijakan menurut apa yang sudah ditetapkan. Dalam melaksanakan program pemberian beasiswa daerah untuk mahasiswa Kabupaten Lamandau sudah mengerjakan dan melaksanakan tugas sesuai dengan arahan-arahan sudah diberikan atasan dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan SOP yang sudah ditentukan untuk melaksanakan program pemberian beasiswa untuk mahasiswa daerah Kabupaten Lamandau. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian penulis.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan peneliti dan disajikan lalu dibahas dalam permasalahan terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara dapat disimpulkan bahwa Penyelenggaraan beasiswa ini dilingkungan Kantor Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara dilaksanakan oleh bagian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara mengatakan dalam komunikasi atau penyampaian dalam kebijakan sudah berjalan dengan baik tetapi tidak dengan masyarakat yang tidak menerima program bantuan tersebut.

Dalam pelaksanaan proses komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui bagian Kesejahteraan Sosial, harus dapat ditingkatkan lagi dengan berbagai informasi terkait program pemberian beasiswa. Sehingga pemerataan pembangunan manusia yang diharapkan dapat terwujud secara optimal dan sampai ke masyarakat yang lainnya.

Keberhasilan implementasi kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam koordinasi sudah berjalan dengan baik. Namun, adapun kendalanya yaitu keterbatasan waktu yang diberikan pemerintah lokal. Sehingga proses yang dilaksanakan sangat memakan waktu yang singkat.

Implementasi kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di kabupaten labuhanbatu utara dari sisi sumber daya manusia dalam pelaksanaannya kurang berjalan dengan baik. Tetapi sumber daya dalam menjalankan tugas dan untuk jumlah staf sudah memadai sebagai pelaksana pemberian beasiswa daerah.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran dalam Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Kabupaten Labuhanbatu Utara sebagai berikut :

1. Diharapkan bagian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara memberikan informasi mengenai program penyaluran beasiswa berprestasi miskin ini lebih ditingkatkan lagi. Baik melalui media sosial dan sosialisasi. Agar penyampaian informasi bisa sampai kemasyarakat yang lainnya.
2. Diharapkan agar sumber daya manusia bagian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara ditekankan lebih tegas dan kompeten dalam menjalankan kebijakan ini agar tepat arah dan sasaran tanpa memandang dari kalangan manapun. Untuk pemindaian berkas agar diteliti kembali apakah pemohon beasiswa ini layak menerima atau tidak layak menerima.

3. Diharapkan agar disposisi bagian Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Labuhanbatu Utara selalu memberikan pelayanan yang terbaik terhadap program implemetasi kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi.
4. Diharapkan agar pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara melaksanakan pengawasan yang baik dalam program implementasi kebijakan pemberian beasiswa bagi mahasiswa miskin berprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriandi, I. (2017). Implementasi Qanun Nomor 11 Tahun Tahun 2002 Tentang Syariat Islam di Kota Langsa. *Implementasi Kebijakan; Sosialisasi; Kepatuhan Masyarakat*, 11–35.
- Daniel Lenox, fay. (2009). Pengertian Beasiswa. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 6–23.
- Lestari, D., & Widodo, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pentaan , Pengelolaan, dan Di Kota Salatiga. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara*, 02(02), 170–177.
- Ma'rifataini, L. (2018). Implementasi Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam. *Pendidikan Agama Islam*, 16(1), 110–123.
- Palit, D. D., & Palar, N. (2022). *ISSN 2338 – 9613 JAP No. 113 Vol. VIII 2022. VIII(113)*, 12–20.
- Patel. (2019). *implementasi. i*, 9–25.
- Priyatin, N. N., & Rahmi, N. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Kpp Pratama Jakarta Pademangan Tahun 2020. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 3(2), 86–96. <https://doi.org/10.31334/jupasi.v3i2.2210>
- Putri, S. K., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Ilmu, J., Publik, A., & Pemerintahan, M. A. (2018). *IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM BANYUWANGI CERDAS DALAM RANGKA MENDUKUNG*.
- Rahman, M. (2019). Pengaruh Pengawasan dan Pengembangan Karir Terhadap

- Kepuasan Kerja. *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, 04(January), 33–42.
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi Pendidikan Karakter Melalui Manajemen Sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173. <https://doi.org/10.32678/tarbawi.v5i02.2074>
- Sahya Anggara. (2014). Kebijakan Publik. In *Kebijakan Publik*.
- Saputra, A., Kusmanto, H., & Turnip, K. (2016). Implementation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia in the Development of Student Organizations Agung. *Jurnal Administrasi Publik : Public Administration Journal*, 6(1), 1–21. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/1052>
- Siahaan, C., & Adrian, D. (2021). Komunikasi Dalam Persepsi Masyarakat Tentang Kebijakan Pemerintah Dimasa Pandemi. *Kinesik*, 8(2), 158–167. <https://doi.org/10.22487/ejk.v8i2.159>
- Subekti, M., Faozanudin, M., & Rokhman, A. (2017). Pengaruh Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi Dan Struktur Birokrasi Terhadap Efektifitas Implementasi Program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Negeri Di Kecamatan Tambak. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 58–71. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.923>
- Sulaeman, D., Novianti Yusuf, R., Karina Damayanti, W., & Arifudin, O. (2022). Implementasi Media Peraga dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 71–77.

Utami, Y. P. (2021). Implementasi Program Pemberian Beasiswa Daerah Untuk Mahasiswa Kabupaten Lamandau. *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan*, 10(1), 1–12. <https://doi.org/10.37304/jispar.v10i1.2285>

Wahab dalam webster. (2020). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN DI KABUPATEN LUWU TIMUR. *Konstruksi Pemberitaan Stigma Anti-China Pada Kasus Covid-19 Di Kompas.Com*, 68(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2014.07.001%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ndteint.2017.12.003%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.matdes.2017.02.024>

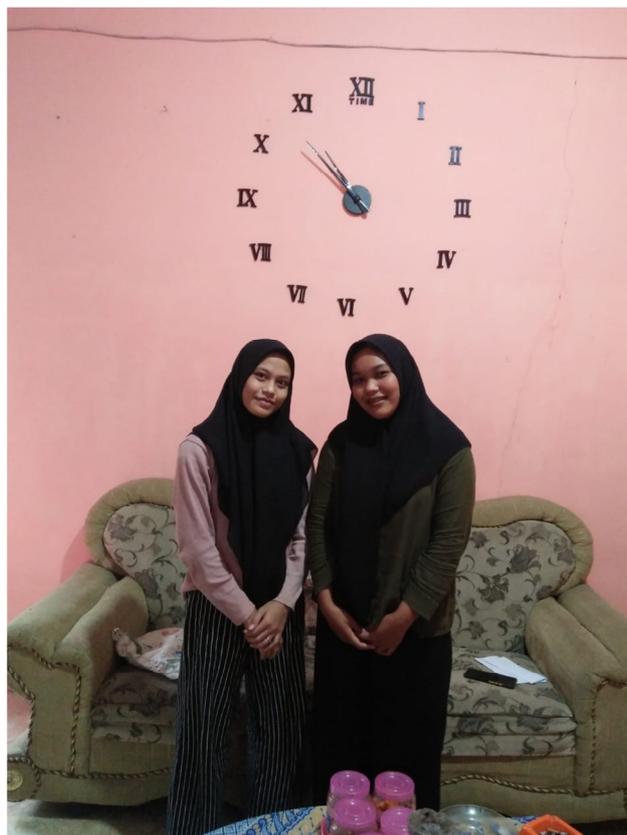
Dokumen Resmi :

Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Labuhanbatu Utara

Buku :

Amrizal, D (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Medan Lembaga Penelitian dan Penulisan Aqli.

DOKUMENTASI





Acc. PB 27/5-2022
Gur

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA

1. Adanya komunikasi atau penyampaian dalam kebijakan
 - a. Menurut Bapak/Ibu bagaimana cara komunikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan masyarakat dalam implementasi kebijakan?
 - b. Apa saja kendala yang dihadapi dalam proses komunikasi antara pembuat kebijakan terhadap pelaksana kebijakan?
 - c. Siapa yang memiliki tanggung jawab dalam program pemberian beasiswa bagi mahasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
2. Adanya sumber daya dalam kebijakan
 - a. Menurut Bapak/Ibu apakah SDM di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini sudah menjalankan tugas sesuai dengan bidangnya dalam implementasi kebijakan?
 - b. Apakah program pemberian beasiswa bagi mahasiswa ini berjalan dengan efektif?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam program pemberian beasiswa bagi mahasiswa?
3. Adanya pelaksanaan yang dilakukan dalam implementasi kebijakan
 - a. Bagaimana Bapak/Ibu menemukan kriteria bagi penerima beasiswa miskin berprestasi?
 - b. Bagaimana strategi penyaluran beasiswa agar tepat sasaran bagi penerima beasiswa miskin berprestasi?

- c. Apa kendala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam menyalurkan beasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara?
4. Adanya koordinasi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan
 - a. Apakah koordinasi antara pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Labuhanbatu Utara dengan masyarakat dalam penyampaian program beasiswa sudah berjalan dengan baik?
 - b. Bagaimana peran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui program pemberian beasiswa bagi mahasiswa?
 - c. Apa saja kendala yang dihadapi dalam hubungan koordinasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Lisa Azmi Lubis
Tempat/Tgl Lahir : Medan, 1 November 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Perk. Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara
Anak ke : 6 dari 6 bersaudara

Nama Orang Tua

Ayah : Zainuddin Lubis
Ibu : Anni Tumiar Sitohang
Alamat : Perk. Londut, Kec. Kualuh Hulu, Kab. Labuhanbatu Utara

Pendidikan Formal

1. MIS Islamiyah Londut
2. MTs Islamiyah Londut
3. SMA N 1 Kualuh Hulu
4. Kuliah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, 15 September 2022



LISA AZMI LUBIS



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
JALAN JEND. SUDIRMAN TELP. 0624-92070
AEK KANOPAN- 21457

Aek Kanopan, 30 Juni 2022

Nomor : 57A / 1248 / Kesra / 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Sumatera Utara
di-

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 719/KET/II.3.AU/UMSU-03/F/2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Tanggal 27 Mei 2022, dengan ini menerangkan bahwasanya :

Nama : Lisa Azmi Lubis
Nim : 1803100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Judul Proposal : Implementasi Kebijakan Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi dalam meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Labuhanbatu Utara

Benar telah melakukan penelitian pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Demikian surat ini kami buat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD SUIB, S.Pd., M.M
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690906 199412 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Labuhanbatu Utara (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara (sebagai laporan);
3. Peringgal.



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jl. Kapten Muchtar Basri, BA No.3 Medan 20238 Telp. 061-66224567-6610450 Ext 200-201 Fax. 0616625474
Homepage: <http://www.umsu.net> E-mail: kampus@umsu.net

Kepada : Yth. Bapak/Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di
Tempat

Perihal : Permohonan Perubahan Judul Skripsi

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Lisa Azmi Lubis
NPM : 1803100081
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Mengajukan permohonan perubahan judul skripsi, sebagai berikut :

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MISKIN
BERPRESTASI DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Menjadi:

→ KEDIRYAKAN
**IMPLEMENTASI PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN
BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA
MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya.
Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Dosen Pembimbing

(Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP)

Medan, Maret 2022
Hormat Pemohon,

(LISA AZMI LUBIS)

Ketua Program Studi
Ilmu Administrasi Publik

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 367/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
Tempat : Online/Daring
Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.



SK-4

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGGAP	PEMIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
6	AINUN SERIDAH	1803100010	JEHAN RIDHO ZHARSYAH S.Sos., M.Si.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI MANDALING NATAL NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG PENGEMBANGAN OBJEK WISATA SAMPURAGA DI DESA SIRAMBAS
7	DIANA SAHITRI	1803100011	NALLI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd.	SYAFRUDDIN, S.Sos., M.H.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN KEPALA DESA TELUK PANJI
8	RIZKA ADE GITA ANANDA	1803100004	NALLI KHAIRAH, S.I.P., M.Pd.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	STRATEGI PENGAWASAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN PROVINSI PADA DIMAS PERHUBUNGAN PROVINSI SUMATERA UTARA
9	RISKA SOLVIA MONICA	1803100034	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	DR. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	STRATEGI PERENCANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAB. ACEH TENGAH
10	LISA AZMI LUBIS	1803100081	DEDI AMRIZAL, S.Sos., M.Si.	DR. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI LABUHANBATU UTARA NO.21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN BEASISWA MISKIN BERPRESTASI DI KAB. LABUHANBARU UTARA

Medan, 12 Syaban 1443 H

15 Maret 2022 M

Dekan
DR. ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP.



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Nomor : 719/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : **Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa**

Medan, 26 Syawal 1443 H
27 Mei 2022 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Utara
di-

Tempat.

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **LISA AZMI LUBIS**
N P M : 1803100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan


Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN: 0030017402



Cc : File.





UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> ✉ fisip@umsu.ac.id 📱 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
JUDUL SKRIPSI**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu
Ketua Program Studi
FISIP UMSU
di
Medan.

Medan, 8 Januari 2022

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : LISA AZMI LUBIS
N P M : 1003100081
Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif 3,54

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara No 21 Tahun 2016 Tentang Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi di Kab. Labuhanbatu utara	Acc 8/1/2021
2	Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati No 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Miskin Berprestasi Dalam Rangka meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kab. Labuhanbatu Utara	
3	Implementasi Kebijakan Perbup No 21 Tahun 2016 Tentang Beasiswa di Kabupaten Labuhanbatu Utara	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Rekomendasi Ketua Program Studi :
Diteruskan kepada Dekan untuk
Peretapan Judul dan Pembimbing.

Pemohon

(LISA AZMI LUBIS)

Medan, tgl. 8 Januari 2022

Ketua,

(ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP)
NIDN: 0122118801

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
Program Studi.....

PRB: ~~ANANDA MAHARDIKA~~
DR. Siti Hayjar

(DR. Siti Hayjar, S.Sos., Msp)
NIDN:



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id>

fisip@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Sk-2

SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI DAN PEMBIMBING Nomor : 105/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : **08 Januari 2022**, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **LISA AZMI LUBIS**
N P M : 1803100081
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA**
Pembimbing : **Dr. SITI HAJAR, S.Sos., MSP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL.3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 028.18.310 tahun 2021.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 08 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 27 Syaban 1443 H
30 Maret 2022 M

Dekan



Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan;
2. Pembimbing ybs. di Medan;





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

Sk-3

PERMOHONAN
SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Kepada Yth.

Medan, 24-Februari.....2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : Lisa Azmi Lubis
N P M : 1803100081
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor...105.../SK/IL.3/UMSU-03/F/2022.. tanggal 21 Januari 2022..... dengan judul sebagai berikut :

Implementasi Peraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pemberian Beasiswa Miskin Berprestasi Di Kabupaten Labuhanbatu
Utara.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposals Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Menyetujui :

(Pembimbing)

(Dr. Siti Hajar S.Sos., MSP.....)

Pemohon,

(Lisa Azmi Lubis.....)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : http://www.umsu.ac.id E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : LISA AZMI LUBIS
N P M : 1803100081
Jurusan : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA.

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1.	28-01-2022	Perbaiki latar belakang dan uraian teoritis	
2.	3-02-2022	Perbaiki uraian teoritis	
3.	7-02-2022	Penambahan uraian teoritis	
4.	24-02-2022	Acc Seminar Proposal	
5.	25-03-2022	Diskusi terkait perubahan judul skripsi	
6.	29-03-2022	Perbaiki latar belakang selesai seminar proposal	
7.	1-04-2022	Diskusi draft wawancara	
8.	27-05-2022	Acc draft wawancara	
9.	22-07-2022	Revisi bab III dan IV	
10.	26-07-2022	Perbaiki pembahasan	
11.	09-08-2022	Perbaiki pembahasan dan penambahan Bab V	
12.	15-08-2022	Koreksi ulang bab I - V	
13.	19-08-2022	Bimbingan Artikel	
14.	23-08-2022	Acc Skripsi	

Medan, 19 - Agustus - 2022.



Dekan,

(DR. ARIFIN SALEH, S.SOS, M.SP)

Ketua Jurusan,

(ANANDA MAHARDIKA, S.SOS, M.SP)

Pembimbing,

(DR. SITI HAQAR, S.SOS, M.SP)

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor : 1321/UND/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022



Unggul! Cerdas! Terpercaya!

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022
 Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
 Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



No.	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
6	TIARA ANNISA	1803100021	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	IDA MARTINELLY, SH, MM	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENERAPAN E-ABSEN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA I
7	RIANDY PUTRA	1803100077	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos, M.Si	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NAPZA DI KABUPATEN LABUHANBATU
8	IMANDA ZUHDI	1803100085	NALLI KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSI TROTOAR DI KOTA MEDAN
9	LISA AZMI LUBIS	1803100081	IDA MARTINELLY, SH, MM	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos, M.SP	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA MISKIN BERPRESTASI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
10	RISKA SOLVIA MONICA	1803100034	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	PENGEMBANGAN PARIWISATA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KAMPUNG KERAWANG KABUPATEN ACEH TENGAH

Notulis Sidang :

Ditetapkan oleh :



Prof. Dr. MUBTAMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Ketua

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos, MSP

Medan, 06 Syafer 1444 H
03 September 2022 M

1444 H

Panitia Ujian

Sekretaris



Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos, M.I.kom